

KARAKTERISTIK ANGGOTA LEGISLATIF DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Zaitul¹, Welly Jefrita², dan Dandes Rifa³

Jurusan Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding author: zaitul@bunghatta.ac.id  <https://orcid.org/0000-0001-6454-9607>

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 08/12/2020

Revisi pertama tanggal: 13/04/2021

Diterima tanggal: 24/05/2021

Tersedia online tanggal: 21/06/2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik anggota legislatif daerah (DPRD) dengan kinerja pemerintah daerah. Jumlah dan usia anggota legislatif serta latar belakang pendidikan dan keberadaan anggota legislatif wanita digunakan sebagai proksi dari keberagaman dalam keanggotaan dewan legislatif daerah. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi multivariat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh representasi jumlah (ukuran) dan umur anggota legislatif serta latar belakang pendidikan maupun keberadaan wanita dalam keanggotaan dewan legislatif di daerah (DPRD). Temuan ini mengindikasikan dominannya nuansa politik pada pemerintahan daerah sehingga anggota legislatif daerah belum dapat berperan optimal dalam fungsi pengawasannya untuk berkontribusi mendorong pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: kinerja pemerintah daerah, karakteristik anggota legislatif

ABSTRACT

This study aimed to investigate the relationship between legislative characteristics and local government performance. The number and age of legislative members and the educational background and the presence of female legislators are used as proxies for diversity in the membership of regional legislative councils. The purposive sampling technique determined the research sample. The secondary data obtained were analyzed using multivariate regression analysis. Research findings indicate that local government performance is not significantly affected by the representation of the number (size) and age of legislative members and educational background, and the presence of women in the membership of the regional legislative council. This finding indicates the dominance of political nuances in local government. Consequently, regional legislators have not been able to play an optimal role in their supervisory function to encourage local government performance.

Keywords: local government performance, legislative characteristics

1. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami perubahan dari beberapa aspek diantaranya yaitu sosial, budaya, dan politik. Dari aspek politik, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem pemilihan kepala negara dan daerah juga telah berubah dari pemilihan oleh DPR-RI dan DPR-D ke pemilihan langsung. Selain itu, sebelumnya peserta pemilu hanya sedikit partai menjadi multi-partai. *Power* eksekutif dan legislatif juga mulai menuju keseimbangan. Jika sebelumnya, pemerintahan (eksekutif) mempunyai kekuasaan (*power*) yang berlebihan sehingga menimbulkan *organisation outcome* yang tidak baik, seperti krisis ekonomi pada tahun 1997. Pasca autonomi daerah peran legislatif mulai nampak walaupun belum begitu signifikan (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Ini terlihat dari kinerja pemerintahan baik pusat maupun daerah belum sesuai dengan target yang diinginkan (Sesotyaningtyas, 2012). Dari survei awal, kinerja kabupaten/kota di pulau Sumatera (81 kabupaten/kota) sebesar 6,37% (kemandirian daerah) dan angka ini jauh dibawah 25% (kategori konsultatif). Untuk itu perlu dikaji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah tersebut.

Beberapa perspektif digunakan untuk menjelaskan variasi kinerja organisasi, seperti pemerintahan daerah. Di antaranya adalah *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), *Resources Dependent Theory* (Pfeffer, 1972) dan *Stewardship Theory* (Davis et al., 1997). Berdasarkan perspektif *Agency Theory* (Michael Jensen & Meckling, 1976), diargumentasikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh dewan pengawas yang melakukan pengawasan dan nasehat pada eksekutif sehingga diharapkan biaya keagenan menurun dan kinerja organisasi mengalami peningkatan. Pemerintahan mempunyai beberapa organ tata kelola yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif adalah organ yang menginisiasi dan mengeksekusi ide tersebut setelah diratifikasi oleh legislatif (Fama & Jensen, 1983b). Selain ratifikasi, legislatif juga mempunyai peran penting lainnya yaitu pengawasan terhadap eksekusi yang telah dilakukan oleh eksekutif (Fama & Jensen, 1983b). Legislatif dalam konteks *corporate governance* dinamakan *supervisory board* pada sistem dua dewan (*two-tiers board system*) dan *board of director* pada sistem satu dewan (*one-tier board system*) (Ilona et al., 2019; Zaitul, Elfiswandi, et al., 2019; Zaitul, Melmusi, et al., 2019; Zaitul & Ilona, 2018, 2019). Legislatif sebagai dewan pengawas juga mempunyai peran lainnya seperti penasehat dan terlibat dalam penyusunan rencana strategis perusahaan (Goodstein et al., 1994). Pada sektor publik, masih terbatas bukti empiris mengenai peran legislatif atau dewan perwakilan daerah.

Abels & Martelli (2012), Adeabah et al. (2019), Fakoya & Nakeng (2019) Kang & Zardkoohi (2005), Mccahery & Vermeulen (2014) dan Robeson & Connor (2013) telah melakukan penelitian tentang peran dewan pengawas dari perspektif teori keagenan, namun lebih berfokus pada organisasi komersial (*profit-oriented organisation*). Masih terbatas studi yang mengangkat keberadaan fungsi pengawasan dewan legislatif pada organisasi sektor publik seperti pemerintahan daerah. Untuk mengisi kesenjangan penelitian diperlukan studi yang menguji tentang karakteristik anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah memberikan membuktikan bukti secara empiris dampak karakteristik anggota legislatif pada tingkatan DPR daerah dengan menggunakan proksi ukuran (jumlah) anggota legislatif/DPRD, umur anggota legislatif, keberadaan wanita di anggota legislatif

(DPRD), dan latar belakang pendidikan anggota legislatif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berkaitan dengan justifikasi teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) terutama peran pengawasan anggota legislatif pada organisasi sektor publik. Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di daerah dalam mempertimbangkan proporsi dan keberagaman anggota dewan legislatif untuk menunjang tercapainya kinerja pemerintahan daerah melalui fungsi pengawasan yang dilakukannya.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi yang diperoleh akibat penerapan strategi organisasi, baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan (Ainin et al., 2015), termasuk dalam hal ini adalah kinerja organisasi sektor publik seperti pemerintahan daerah. Pada sektor publik, kinerja keuangan bisa berupa rasio kemandirian, sedangkan kinerja non-keuangan bisa dalam bentuk indeks kualitas manusia, indeks lingkungan dan lain sebagainya. Kinerja pemerintahan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan strategi keuangan, pelayanan, operasional dan teknologi. Selain itu, kinerja pemerintahan daerah juga bisa dipengaruhi oleh aspek *institutional*, *principal-agent relationship*, dan aspek *organizational* lainnya. *Principal agent-relationship* pada pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan hubungan antara eksekutif (sebagai *agent*) dan masyarakat (sebagai *principal*), maupun hubungan antara eksekutif dan legislatif. *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) mengargumentasikan bahwa kinerja pemerintahan daerah dapat ditentukan oleh keberagaman atau karakteristik dari dewan pengawas (DPRD) sebagai pihak legislatif yang dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap capaian kinerja dari pemerintah daerah. Riset empiris menemukan bahwa karakteristik anggota legislatif pada DPRD, seperti umur dan jumlah (ukuran) anggota legislatif, latar belakang pendidikan anggota legislatif dan keberadaan wanita di dalam anggota anggota legislatif berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah.

Sesuai dengan UU no. 32 tahun 2004, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah berperan sebagai mitra kerja kepala daerah (eksekutif) dan melakukan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ukuran DPRD adalah jumlah anggota DPRD yang terpilih pada periode tertentu. DPRD yang dipilih oleh rakyat bertugas untuk memastikan eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyat yaitu mensejahterakan rakyat. Kegiatan pengawasan efektif yang di lakukan oleh DPRD akan mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen & Meckling, 1976) sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Karakteristik DPRD merupakan mekanisme *governance* internal bagi pemerintahan daerah. Ada dua dalil mengenai manfaat jumlah DPRD yang banyak. Pertama adalah semakin banyak jumlah anggota DPRD maka semakin tinggi kinerja pemerintahan daerah. Kedua, semakin banyak jumlah anggota DPRD maka semakin rendah kinerja pemerintahan daerah. Dalil pertama di atas di dukung oleh *resources dependency theory* (Pfeffer, 1972) dan dalil kedua di dukung oleh *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976). Ukuran DPRD menjadi perhatian karena ukuran yang besar akan berdampak terhadap keanekaragaman anggota DPRD dalam aspek pengalaman, pengetahuan dan keterampilan sehingga DPRD akan kreatif dan inovatif.

Pada akhirnya, DPRD akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan akhirnya akan menurunkan biaya keagenan serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Selanjutnya, ukuran DPRD yang banyak juga mempunyai kelemahan dari aspek komunikasi, koordinasi dan proses pengambilan keputusan. Saragih & Setyaningrum (2015) menemukan adanya pengaruh ukuran DPRD secara positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Ukuran anggota legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Umur anggota DPRD adalah usia rata-rata anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Umur dewan pengawas sangat penting dalam menentukan kinerja seseorang (Hambrick & Mason, 1984). Anggota dewan yang lebih muda, cenderung berani mengambil risiko dan sedangkan dewan yang lebih tua lebih cenderung untuk mencari lebih banyak informasi, mengevaluasi informasi secara akurat dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengambil keputusan (Hambrick & Mason, 1984). Berdasarkan premis diatas, anggota DPRD yang lebih tua mungkin membutuhkan informasi yang banyak sebelum mengambil keputusan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan. Hal ini, akan berdampak terhadap ratifikasi dan monitoring yang kurang efektif sehingga akan berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Selanjutnya, Kang, Cheng, & Gray (2007) menambahkan bahwa anggota dewan yang lebih tua cenderung mempunyai pengalaman, sumberdaya ekonomi, dan *wisdom* yang lebih tinggi. Dengan pengalaman, sumberdaya ekonomi dan *wisdom* yang tinggi mungkin akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan daerah. McClelland et al. (2012) berpendapat bahwa anggota dewan yang muda cenderung memilih strategi yang berisiko tinggi agar kinerja organisasi masa yang akan datang meningkat. Penelitian tentang pengaruh umur anggota DPRD terhadap kinerja pemerintahan daerah masih terbatas, meskipun penelitian pengaruh dewan pengawas di sektor swasta sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti, Kagzi & Guha (2018) yang menemukan bahwa umur dewan pengarah (*board of directors*) berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Dapat diargumenasikan bahwa semakin senior umur anggota dewan legislatif akan berdampak terhadap positif kinerja pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan yang dilakukannya sehingga dapat diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Umur anggota legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Keberadaan wanita pada anggota dewan legislatif bisa dipandang dari beberapa perspektif, seperti perspektif keberagaman (*diversity*). Gordini & Rancati (2017) berpendapat bahwa *diversity* yang tinggi meningkatkan pemahaman anggota dewan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, *diversity* akan meningkatkan kreativitas, inovativitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga membawa organisasi lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lainnya (Gordini & Rancati, 2017). Dalam konteks *gender diversity*, Fama & Jensen (1983) mengemukakan bahwa keberadaan wanita di dalam keanggotaan dewan akan menurunkan biaya keagenan. Keberadaan wanita di dewan juga akan meningkatkan independensi dewan karena wanita mengangkatkan isu atau masalah yang tidak dipertanyakan oleh anggota dewan laki-laki (Carter et al., 2003). Carter et al. (2003) menambahkan bahwa keberadaan wanita akan meningkatkan kualitas dewan sehingga akan meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan. Adams &

Ferreira (2009) menyimpulkan bahwa keberadaan wanita di dalam keanggotaan dewan akan mempromosikan komunikasi yang lebih efektif antara eksekutif dan dewan pengawas. Dengan demikian dapat diargumentasikan bahwa keberadaan wanita di dalam anggota legislatif daerah akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah sehingga dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: keberadaan wanita di legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif daerah merupakan atribut penting bagi DPRD. Dalam rapat-rapat (seperti, rapat kerja atau raker) DPRD dengan partnernya (eksekutif), anggota DPRD memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar terjadi komunikasi dua arah antara anggota DPRD dan partnernya. *Resources cognitive theory* (Fiedler, 1986), memprediksi bahwa pimpinan yang berpendidikan mempunyai peluang besar untuk merencanakan dan memutuskan sesuatu lebih baik dibandingkan dengan yang tidak punya pendidikan. Pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi jika pemimpinnya berpendidikan (Besley et al., 2011). Hsu (2007) berpendapat bahwa anggota dewan yang mempunyai pendidikan dapat mentransformasi dan mengurangi asimetri informasi antara eksekutif dan pemegang saham (dalam konteks pemerintahan daerah adalah masyarakat sebagai *principal*) sehingga tingkat transparansi semakin tinggi. Anggota dewan yang berpendidikan akan mampu menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan strategi dan program kerja (Fama & Jensen, 1983b), sehingga akan mengurangi masalah keagenan dan biaya keagenan serta akhirnya meningkatkan kinerja. Berdasarkan argumentasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif (DPRD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Latar belakang pendidikan anggota legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Objek penelitian ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian terdahulu yang mengkaji kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan kabupaten dan kota di pulau Jawa. Populasi dari penelitian ini berjumlah 153 Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan *purposive sampling method* dengan kriteria sebagai berikut: 1) kabupaten dan kota yang laporan keuangan untuk mendapatkan data total belanja dan total penerimaan tersedia, 2) data anggota legislatif yang lengkap untuk memperoleh data tentang jumlah anggota legislatif, umur anggota legislatif, gender di legislatif, dan latar belakang pendidikan anggota legislatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota dan data non keuangan. Data non keuangan seperti ukuran legislatif, umur, gender, dan latar belakang pendidikan legislatif diperoleh dari data anggota DPRD per Kabupaten/Kota melalui website KPURI yang tersedia di website www.kpu.go.id.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian daerah dengan cara menghitung pendapatan asli daerah di bagi dengan total pendapatan. Mengadopsi pengukuran karakteristik dewan komisaris pada organisasi swasta, ukuran

anggota legislatif (DPRD) diukur dengan jumlah anggota DPRD pada tahun t di kabupaten/kota i. Umur anggota legislatif diukur dengan menjumlahkan umur anggota legislatif DPRD dibagi jumlah anggota DPRD. Keberadaan wanita di DPRD diukur dengan membandingkan jumlah wanita di DPRD di bagi dengan jumlah anggota DPRD keseluruhan. Selanjutnya, latar belakang pendidikan anggota DPRD diukur dengan membandingkan antara anggota DPRD yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi (ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi) dengan total anggota DPRD (Hsu, 2007). Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran pemerintahan daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Ukuran pemerintahan daerah di ukur dengan jumlah aset pemerintahan daerah pada tahun t dan kabupaten/kota i. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) menggunakan rumus pertumbuhan PAD tahun t+1 dan tahun t. Model penelitian menggunakan model regresi linear berganda dengan model persamaan matematis sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 U_{DPRD} + \beta_2 U_{DPRD} + \beta_3 G_{DPRD} + \beta_4 LP_{DPRD} + \beta_5 UPD + \beta_6 PPAD + \varepsilon$$

Keterangan:

- KPD : Kinerja Pemerintah Daerah
U_DPRD : Ukuran dewan legislatif daerah (DPRD)
U_DPRD : Umur anggota dewan legislatif DPRD
G_DPRD : Keberadaan wanita di DPRD
LP_DPRD : Latar belakang pendidikan anggota legislatif (DPRD)
UPD : Ukuran pemerintah daerah
PPAD : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 α : alpha
 β : konstanta
 ε : error

Analisa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data. Uji outlier menggunakan pendekatan Grubb (Grubbs, 1969). Nilai skewness dibagi standar error digunakan untuk menguji normalitas dan jika nilainya lebih kecil dari 2,59 (observasi <300) maka variabel bisa dikatakan normal (Manning & Munro, 2004). Uji autokorelasi menggunakan alat uji Durbin-Watson (Durbin & Watson, 1950). Uji multikolinearitas menggunakan alat uji tolerance dan VIF (Gujarati, 1995), sedangkan uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan Glejser (Glejser, 1969). Uji t statistik dan nilai koefisien digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Nilai F statistik dan nilai R² dievaluasi terlebih dahulu sebelum menginterpretasikan nilai t statistik (Hair Jr. et al., 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

Sampel akhir penelitian ini adalah sebanyak 81 yang merepresentasikan 53% dari populasi kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut diperoleh dari populasi sebanyak 153 kab/kota dikurangi dengan 72 (47%) kab/kota yang tidak mempunyai informasi lengkap tentang anggota legislatif daerah (DPRD). Tabel 1 menyajikan hasil uji outlier dan statistik deskriptif variabel penelitian. Variabel kinerja pemerintahan daerah terdeteksi 5 observasi outlier (6%) dan mempunyai nilai rata-rata 6,37%. Nilai ini jauh dari batas kategori konsultasi yaitu 25%. Variabel ukuran DPR tidak terdeteksi outlier dan

mempunyai jumlah rata-rata anggota DPRD sebanyak 33 orang dengan jumlah anggota DPRD minimum 20 orang serta maksimum 50 orang. Jumlah rata-rata anggota DPRD ini lebih rendah dari temuan studi Saragih & Setyaningrum (2015) yaitu sebesar 36,09 orang. Umur rata-rata anggota legislatif DPRD kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian adalah 45,10 tahun. Jumlah wanita sebagai anggota DPRD dari total anggota DPRD adalah 11,35%. Peran wanita sebagai pengawas pada sektor publik jauh berbeda dengan sektor swasta (sebagai dewan komisaris) yaitu 0,134 (indeks Blau) (Melmusi et al., 2019). Rata-rata persentase anggota legislatif DPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi adalah 13,67%. Ukuran pemerintahan daerah rata-rata Rp. 977,07 miliar jauh rendah jika dibandingkan dengan lebih rendah jika dibandingkan dengan temuan studi sebelumnya (Noviyanti & Kiswanto, 2016; Saragih & Setyaningrum, 2015). Rata-rata tingkat pertumbuhan PAD kabupaten/kota dari sampel penelitian adalah 17,23%.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Setelah Outlier

Variabel	\sum Outlier	%	Deskriptif Statistik Setelah Outlier			
			Min	Max	Mean	Std Deviasi
Kinerja Pemerintah Daerah (%)	5	6	2,00	16,00	6,37	3,67
Ukuran DPRD (orang)	0	0	20,00	50,00	33,09	9,47
Umur anggota legislatif/DPRD (tahun)	2	2	39,00	50,00	45,10	2,11
Gender DPRD (%)	0	0	0,00	30,00	11,35	7,04
Latar Belakang Pendidikan anggota legislatif (%)	2	2	1,00	40,00	13,67	8,00
Ukuran Pemerintah Daerah (Rp. Juta)	2	2	367.116	1.951.069	977.070	420.282
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	2	2	50,00	50,00	17,23	16,38

Sumber: Data Penelitian (diolah)

Sebelum pengujian regresi dilakukan maka model harus bebas dari masalah asumsi klasik (Wooldridge, 2003). Uji asumsi klasik yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Pada penelitian ini, nilai Skewness per standar error digunakan untuk mendeteksi apakah ada masalah normalitas. Kriteria penilaian adalah antara -2,59 dan +2,59 jika observasi kurang dari 300 (Manning & Munro, 2004). Berdasarkan Tabel 2 berikut ini, hasil analisis tahap pertama menunjukkan lima variabel tidak normal karena nilai S/SE diluar rentang di atas. Oleh karena itu, lima variabel ini ditransformasi ke Ln (KPD, G_DPRD, UPD) dan SQRT (LP_DPRD, dan PPAD) kemudian di uji kembali nilai S/SE. Pada akhirnya, kelima variabel tersebut sudah memiliki nilai di dalam rentang -2,59 dan +2,59 sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Skewness			Keputusan	Transform	
	S	Std error	S/SE		Ln	SQRT
Kinerja Pemerintah Daerah	1,220	0,267	45,693	Tidak normal	0,147*	
Ukuran anggota legislatif DPRD	0,210*	0,267	0,787	Normal		
Umur anggota legislatif (DPRD)	-0,084*	0,267	-0,315	Normal		
Keberadaaan wanita dalam legislatif	0,745	0,267	2,290	Tidak normal	-0,224*	
Latar Belakang Pendidikan Anggota Legislatif	1,070	0,267	4,007	Tidak normal		0,092*
Ukuran Pemerintah Daerah	1,110	0,267	4,157	Tidak normal	0,379*	
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-0,774	0,267	-2,899	Tidak normal		0,531*

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikolineritas yang ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen tidak berhubungan (tidak berkorelasi) satu sama lain karena nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 (Gujarati, 1995). Dengan demikian dapat dinyatakan tidak ada masalah multikolinearitas. Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (Durbin & Watson, 1950) dengan nilai batas DW diantara dU dan 4-dU untuk mendeteksi masalah autokorelasi (Gujarati, 1995). Hasil uji DW menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,513 berada di antara -2 dan +2, sehingga model terbebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	Cut off	VIF
Ukuran anggota legislatif (DPRD)	0,247	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	4,050
Umur anggota legislatif (DPRD)	0,935	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	1,070
Keberadaan Wanita dalam Legislatif	0,945	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	1,058
Latar Belakang Pendidikan Anggota Legislatif	0,961	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	1,040
Ukuran Pemerintah Daerah	0,246	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	4,067
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	0,889	Tolerance $>0,10$, <i>VIF</i> <10	1,125

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan Glejser (Glejser, 1969). Uji Glejser ini meregresi nilai *absolut unstandardised residual* dengan variabel independen. Jika model tidak layak atau tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolut unstandardised residual* maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai probabilitas (*sig*) dalam tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sebagaimana dinyatakan pada Tabel 4. Dengan demikian dalam model yang diuji telah memenuhi semua persyaratan asumsi normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas maupun masalah multikolinieritas. Oleh karena itu pengujian dapat dilanjutkan dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada analisis berikutnya yaitu analisis regresi linear berganda.

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	SE		
Konstanta	-1,321	2,039	-0,648	0,519
Ukuran anggota legislatif (DPRD)	0,000	0,007	-0,140	0,889
Umur anggota legislatif (DPRD)	0,022	0,016	1,391	0,168
Keberadaan Wanita dalam Legislatif	0,020	0,056	0,359	0,721
Latar Belakang Pendidikan Anggota Legislatif	-0,010	0,030	-0,320	0,750
Ukuran Pemerintah Daerah	0,057	0,156	0,369	0,714
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-0,006	0,026	-0,218	0,828

Ringkasan hasil pengujian analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5. Nilai uji F adalah sebesar 1,955 dan signifikan pada 0,084 (lebih kecil dari *alpha* 0,10), karena nilai signifikannya lebih kecil dari *alpha* 0,10 maka model regresi yang digunakan

sudah layak sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian yang diuji. Kemampuan prediksi model penelitian yang diuji ditunjukkan oleh nilai *R Square* sebesar 0,069. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu ukuran legislatif, umur legislatif, gender legislatif, latar belakang pendidikan legislatif dan variabel kontrol yaitu ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan variabel kontribusinya dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,069 atau 6,9%, sedangkan sisanya sebesar 93,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dispesifikasikan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t statistik	Signifikan
Ukuran anggota legislatif (DPRD)	-0,002	-0,190	0,850
Umur anggota legislatif (DPRD)	-0,001	-0,045	0,964
Keberadaan Wanita dalam Legislatif	0,090	0,880	0,382
Latar Belakang Pendidikan Anggota Legislatif	0,020	0,354	0,724
Ukuran Pemerintah Daerah	0,254	0,886	0,379
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-0,141	-2,957	0,004**
R Square	= 0,069		
F test	= 1,955		
Sig. F	= 0,084*		

Keterangan: **signifikan pada $\alpha=0,05$; **signifikan pada $\alpha=0,10$

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 menunjukkan bahwa ukuran anggota legislatif daerah (DPRD) berpengaruh negatif tidak signifikan kinerja pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh koefisien regresinya -0,002 dan signifikansi 0,850 (lebih besar dari alpha 0,05). Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini tidak dapat didukung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Saragih & Setyaningrum, 2015; Sesotyaningtyas, 2012) yang menemukan adanya pengaruh signifikan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) tentang pengaruh umur anggota legislatif DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresinya -0,001 dan signifikansi 0,964 (lebih besar dari alpha 0,05) sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan premis (Hambrick & Mason, 1984) yang menyatakan bahwa umur merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3) dapat diketahui bahwa keberadaan wanita dalam keanggotaan legislatif di DPRD berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresinya 0,090 dan signifikansi 0,382 (lebih besar dari alpha 0,05) sehingga hipotesis 3 (H_3) tidak dapat didukung dalam penelitian ini. Temuan ini dengan demikian tidak mendukung premis Fama & Jensen (1983) yang menyatakan bahwa keberadaan wanita di dewan akan menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan kinerja organisasi. Hasil ini juga mengkonfrontasi pendapat Adams & Ferreira (2009) serta Carter et al. (2003) yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam keanggotaan dewan akan meningkatkan kualitas dewan dan mempromosikan komunikasi yang efektif antara eksekutif dan dewan pengawas sehingga pengawasan akan menjadi efektif yang berdampak pada biaya keagenan semakin menurun dan kinerja yang akan meningkat. Hasil

pengujian hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresinya 0,020 dan signifikansi 0,724 (lebih besar dari alpha 0,05) yang berarti bahwa latar belakang pendidikan anggota legislatif DPRD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan *Resources Cognitive Theory* (Fiedler, 1986) yang menyatakan bahwa pemimpin yang berpendidikan akan lebih baik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga monitoring lebih efektif dan akhirnya menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung argumentasi dalam penelitian Besley et al. (2011) dan Hsu (2007) bahwa keberadaan anggota dewan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dapat mentransformasi dan mengurangi asimetri informasi antara eksekutif dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan transparansi. Hasil pengujian variabel kontrol ukuran pemerintah daerah menunjukkan hasil yang positif tetapi tidak signifikan yang ditunjukkan oleh besaran koefisien regresi 0,057 dan signifikansi 0,714 (lebih besar dari *alpha* 0,05). Hasil pengujian variabel kontrol pertumbuhan pendapatan asli daerah mempunyai besaran koefisien regresinya sebesar negatif 0,141 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 (lebih kecil dari *alpha* 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat namun jika tidak dikelola dengan baik maka tidak akan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Pengaruh negatif pertumbuhan PAD terhadap kinerja pemerintahan daerah mempunyai implikasi bahwa pertumbuhan PAD yang tinggi perlu dijadikan sumber dana dan dibelanjakan dengan baik sehingga diperlukan manajemen belanja (keuangan) yang baik. Argumentasi ini didasarkan atas penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan (pendanaan, investasi, dan kebijakan operasi/modal kerja) dan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, dan pengawasan dengan efektif dan efisien akan berdampak terhadap penciptaan nilai (*value creation*) pada pemerintahan daerah.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah (ukuran) dan umur anggota legislatif serta latar belakang pendidikan maupun keberadaan wanita dalam keanggotaan dewan legislatif di daerah (DPRD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif yang tinggi dengan keberagaman pengalaman, pengetahuan dan keterampilan bisa jadi dapat memiliki masalah dalam aspek komunikasi, koordinasi dan proses pengambilan keputusan sehingga kurang berkontribusi dalam kinerja pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa representasi umur anggota legislatif lebih didominasi oleh kelompok usia rata-rata 45 tahun yang dimungkinkan belum merepresentasikan karakteristik kelompok anggota dewan legislatif senior yang bijak dan berpengalaman yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Termasuk juga dalam mengakomodir karakteristik anggota dewan yang mewakili kelompok muda yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko yang dapat berkontribusi pada capaian kinerja pemerintah daerah.

Rata-rata komposisi wanita dalam keanggotaan dewan legislatif di daerah relatif masih rendah hanya sebesar 11,35% dan latar belakang pendidikan anggota dewan yang

berasal dari bidang pendidikan ekonomi (ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi) hanya merepresentasikan sebesar 13,67% sehingga belum cukup mampu berperan secara signifikan dalam pengambilan keputusan dan nasihat pada kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain alasan diatas, tidak berperannya anggota legislatif daerah (DPRD) dalam kinerja pemerintah daerah adalah ditengarai dominannya nuansa politik pada pemerintahan daerah. Untuk itu, hasil penelitian ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa persentase wanita sebagai DPRD perlu ditingkatkan setidaknya sampai 25%. Selain itu, jumlah anggota dewan dengan latar belakang pendidikan ekonomi perlu ditingkatkan agar pengawasan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah menjadi lebih efektif. Penelitian ini mempunyai keterbatasan berkaitan dengan jumlah sampel yang relatif terbatas yang belum merepresentasikan karakteristik anggota legislatif daerah yang ada di kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh karena itu penelitian mendatang dapat melakukan pengujian pada kabupaten dan kota pulau lainnya di Indonesia. Kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan perspektif anggota dewan legislatif di daerah, sehingga diperlukan pengujian lain dengan sudut pandang yang berbeda seperti atribut kepala daerah, strategi pemerintahan daerah dan perspektif lainnya.

Daftar Pustaka

- Abels, P. B., & Martelli, J. T. (2012). Independence and firm performance. *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 7(2), 81–86.
- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007>
- Adeabah, D., Gyeke-dako, A., & Andoh, C. (2019). Board gender diversity, corporate governance and bank efficiency in Ghana : a two stage data envelope analysis (DEA) approach. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(2), 299–320. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0171>
- Ainin, S., Parveen, F., Moghavvemi, S., Jaafar, N. I., & Shuib, N. L. M. (2015). Factors influencing the use of social media by SMEs and its performance outcomes. *Industrial Management & Data Systems*, 115(3), 570–588. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2014-0205>
- Besley, T., Montalvo, J. G., & Reynal-Querol, M. (2011). Do educated leaders matter? *The Economic Journal*, 121(554), 205–227. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02448.x>
- Carter, D., Simkins, B., & Simpson, W. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. *The Financial Review, Wiley Online Library*, 38(1), 33–53. <https://doi.org/10.1111/1540-6288.00034>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Towards a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259249>

- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression. *I. Biometrika*, 37, 1950.
- Fakoya, M. B., & Nakeng, M. V. (2019). Board characteristics and sustainable energy performance of selected companies in South Africa. *Sustainable Production and Consumption*, 18, 190–199. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.02.003>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983a). Agency Problems and Residual Claims. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 327–349. <https://doi.org/10.1086/467038>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983b). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Fiedler, F. E. (1986). The contribution of cognitive resources and leader behavior to organizational performance. *Journal of Applied Social Psychology*, 16(6), 532–548.
- Glejser, H. (1969). A new test for heteroskedasticity. *Association* 64, 316 – 323. *Journal of the American Statistical*, 64, 316–323.
- Goodstein, J., Gautam, K., & Boeker, W. (1994). The Effects of board size and diversity on strategic change. *Strategic Management Journal*, 15, 241–250.
- Gordini, N., & Rancati, E. (2017). Gender diversity in the Italian boardroom and firm financial performance. *Management Research Review*, 40(1), 75–94. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2016-0039>
- Grubbs, F. F. (1969). Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples. *Tachometric*, 11(1), 1–21.
- Gujarati, D. (1995). *Basic Econometric*. McGraw-Hill.
- Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis. In *Exploratory Data Analysis in Business and Economics*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01517-0_3
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.5465/AMR.1984.4277628>
- Hsu, H. (2007). *Boards of directors and audit committees in initial public offerings*. DBA Dissertation. Nova Southeastern University.
- Ilona, D., Zaitul, & Ethika. (2019). Supervisory board and company borrowing : the case of developing economics. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 730–738.
- Jensen, M, & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership. *Strategic Management Journal*, 21(4), 1215–1224.
- Jensen, Michael, & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kagzi, M., & Guha, M. (2018). Does board demographic diversity influence firm performance? Evidence from Indian-knowledge intensive firms. *Benchmarking: An International Journal*, 25(3), 1028–1058. <https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2017-0203>

- Kang, E., & Zardkoohi, A. (2005). Board leadership structure and firm performance. *Corporate Governance*, 13(6), 785–799. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00470.x>
- Kang, H., Cheng, M., & Gray, S. J. (2007). Corporate Governance and Board Composition: diversity and independence of Australian boards. *Corporate Governance-an International Review*, 15(2), 194–207. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00554.x>
- Manning, M. L., & Munro, D. (2004). *The business survey researcher's SPSS cookbook* (2nd ed). Pearson Education.
- Mccahery, J. a, & Vermeulen, E. P. M. (2014). Understanding the Board of Directors after the Financial Crisis. *Journal of Law and Society*, 41(1), 121–151. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2336614>
- McClelland, P. L., Barker, V. L., & Oh, W.-Y. (2012). CEO career horizon and tenure: Future performance implications under different contingencies. *Journal of Business Research*, 65, 1387–1393. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.09.003>
- Melmusi, Z., Ilona, D., Elfiswandi, & Kurniawan, A. (2019). Do Diversity of Directors Improve Market Performance. *The First Economics, Law, Education and Humanities International Conference, 2019*, 125–136. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4303>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemrintah Daerah Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Pfeffer, J. (1972). Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and its Environment. *Administrative Science Quarterly*, 17(2), 218–228. <https://doi.org/10.2307/2393956>
- Robeson, D., & Connor, G. C. O. (2013). Boards of Directors , Innovation , and Performance : An Exploration at Multiple Levels. *J. Prod Innov Manag*, 30(4), 608–625. <https://doi.org/10.1111/jpim.12018>
- Saragih, H., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah di Indonesia tahun 2011-2012. *Simposium Nasional Akuntansi, XVIII, September*, 1–26.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 1–6.
- Wooldridge, J. M. (2003). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (2nd Editio). Thomson South Western. <https://doi.org/10.1017/asb.2017.16>
- Zaitul, Elfiswandi, & Ilona, D. (2019). Board of commissioners involvement and shareholder's wealth. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2 Special Issue 9), 484–490. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1107.0982S919>
- Zaitul, & Ilona, D. (2018). Gender in Audit Committee and Financial Reporting Timeliness : the Case of Unique Continental European Model. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2.29), 436–442. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13668>

Zaitul, & Ilona, D. (2019). Tax Aggressiveness and Politically Connected Company. *KnE Social Sciences*, 10. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4294>

Zaitul, Melmusi, Z., & Ilona, D. (2019). Corporate governance and corporate performance: Financial crisis 2008. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 625–636.